



# Tunjangan Kerja Pegawai Jakarta Berkurang

Dampak tak disetujuinya seluruh anggaran

**JAKARTA** — Dampak tak dibulkannya seluruh anggaran belanja Jakarta tahun ini oleh Kementerian Dalam Negeri adalah berkurangnya tunjangan kinerja pegawai negeri. Pemerintah Jakarta menurunkan nilai poin dari Rp 9.000 menjadi Rp 7.500. "Turun Rp 1 triliun," kata Sekretaris Daerah Syaifullah kemarin.

Dalam peraturan gubernur, total tunjangan kinerja dinamis pegawai pemerintah Jakarta sebesar Rp 19,52 triliun. Kementerian Dalam Negeri hanya menyetujui total belanja pemerintah tahun ini Rp 69,28 triliun dari usulan Rp 72,9 triliun. Akibatnya, banyak program pemerintah yang sudah direncanakan dibatalkan.

Dengan penilaian kinerja yang baru, tunjangan pegawai Jakarta dihitung oleh masing-masing atasan berdasarkan poin yang akan dikonversi ke dalam rupiah. Poin tiap eselon berbeda-beda. Lurah yang setara pejabat eselon IV jumlah poin maksimalnya 4.400 sebulan jika ia melaksanakan semua programnya. "Rata-rata pegawai mencapai 60-80 persen dari poin maksimalnya," kata Agus Suradika, Kepala Badan Kepegawaian.

Selain mengurangi tunjangan kinerja, pemerintah Jakarta akan menyetop pembelian lahan. Menurut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, penghentian pembelian lahan dipilih karena paling tak mengganggu program lain. Tahun-tahun sebelumnya pemerintah gencar membeli lahan tak terpakai untuk dijadikan taman. Kini

anggaran Rp 6 triliun akan dialihkan untuk keperluan lain.

Akibat lain tak disetujuinya semua pagu belanja adalah pengurangan penyertaan modal bagi perusahaan daerah. Tahun ini Bank DKI tak mendapat Rp 1 triliun. Penyertaan modal pemerintah hanya akan dibagikan kepada PT Mass Rapid Transit sebesar Rp 4,627 triliun dan PT Transportasi Jakarta Rp 1 triliun.

Menurut Saefullah, pengurangan lainnya berasal dari penghapusan anggaran sosialisasi peraturan dan kebijakan di tingkat satuan kerja perangkat daerah. Anggaran sosialisasi mencapai 0,41 persen dari total pagu belanja. Perubahan-perubahan nilai pagu ini disampaikan Kementerian Dalam Negeri pada lembar evaluasi setebal 280 halaman. "Kami belum terima lembarnya," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemang-

kasan anggaran tersebut bentuk efisiensi oleh pemerintah Jakarta. Ia mendukung cara Gubernur Basuki berkompromi dengan keputusannya. "Sisa pembangunan tinggal delapan bulan lagi, sehingga tak mungkin usulan diserap seluruhnya," tuturnya.

Dalam sambutan penyerahan APBD itu, Tjahjo mengingatkan pegawai Jakarta agar menolak usulan program Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tak sesuai dengan semangat efisiensi. Telatnya pengesahan APBD, antara lain, disebabkan oleh kisruhnya pembahasan akibat persetujuan Basuki dengan DPRD yang tak terima draf anggaran tak memasukkan usulan mereka.

Tjahjo juga meminta para pegawai segera merealisasi belanja dalam APBD 2015 dan tak menyisakan banyak anggaran di akhir tahun. "Jakarta barometernya provinsi lain."